

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(C A L K)



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH PESISIR**

TAHUN ANGGARAN 2020

KATA PENGANTAR



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, masing-masing OPD wajib mempertanggungjawabkan uang yang dipergunakan. Salah satunya adalah dengan membuat laporan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) tiap akhir tahun anggaran. Kantor Camat Ranah Pesisir merupakan salah satu OPD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Tanggal 30 Nopember 2010.

Dalam penyusunan CALK ini, Kantor Camat Ranah Pesisir mengacu kepada Laporan Realisasi Keuangan yang telah di susun dengan memperhatikan data-data yang ada. Berkaitan hal tersebut dalam tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan.

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) meliputi uraian tentang kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rincian atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

Kami menyadari bahwa laporan keuangan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik yang membangun daripada pengguna Laporan Keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tatakelola pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan Akuntabilitas Publik.



KAMAT RANAH PESISIR

L ARZIL, S.Sos

Pembina Tk I

NIP.19650101 198502 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Ranpes	3
1.3 Sistematika penulisan CALK Kecamatan Ranah Pesisir.....	4
BAB II	
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCATATAN TARGET KINERJA	
2.1 Ekonomi Makro	5
2.2 Kebijakan Keuangan.....	5
BAB III	
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD	
3.1 Ikhtisar Realisasi Capaian Target Kinerja OPD	9
3.2 Hambatan dan Kendala	11
BAB IV	
KEBIJAKAN AKUTANSI	
4.1 Entitas Akutansi	15
4.2 Basis Akutansi	15
4.3 Basis Pengukuran	15
4.4 Penerapan kebijakan Akutansi	16
BAB V PENJELASAN POS-POS KEUANGAN	
5.1 Pendapatan	17
5.2 Belanja	17
5.2.1 Belanja Operasional	17
5.2.2 Belanja Pegawai.....	17
5.2.3 Belanja barang dan Jasa	18
5.2.4 Belanja Modal.....	19
5.3 Penjelasan Pos Neraca	19
5.3.1 Aset	19
5.3.2 Aset Lancar.....	20
5.3.3 Aset Tetap	21
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	23
BAB VII PENUTUP	24

BAB I PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara/Daerah. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu serta dipublikasikan kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari **Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional**, sedangkan SKPD sebagai entitas akuntansi wajib menyusun **Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional**.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.



Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional SKPD dalam rangka pengungkapan yang memadai

Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud pertanggung-jawaban serta transparansi kepada DPRD dan Masyarakat, selanjutnya Laporan Keuangan yang telah disusun diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/ perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan akan dikonsolidasi dengan laporan keuangan SKPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kecamatan Ranah Pesisir.

1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Penyusunan Keuangan Kecamatan Ranah Pesisir

Laporan Keuangan Kecamatan Ranah Pesisir disusun berdasarkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan yaitu:

1. Akuntabilitas Sebagai bahan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Kepala Daerah dan Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran.
2. Manajemen Membantu Kepala Daerah dan para pengguna anggaran untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode pelaporan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
3. Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
4. Keseimbangan antar generasi Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.



- a. **Maksud :**
Penyusunan Laporan Keuangan ini untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan Kecamatan Ranah Pesisir secara transparansi selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2020
- b. **Tujuan :**
Penyusunan Laporan Keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik

1.2 Landasan Hukum Laporan Penyusunan Keuangan Kecamatan Ranah Pesisir

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standard Akuntansi Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- j. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah



1.3 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Kecamatan Ranah Pesisir adalah sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Lapoaran Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II : EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCATATAN TARGET KINERJA

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

BAB III : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian Target

BAB IV : KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Akuntansi
- 4.2 Basis Akuntansi
- 4.3 Basis Pengukuran
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah pada OPD

BAB V : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Pendapatan
- 5.2 Belanja
 - 5.2.1 Belanja Operasional
 - 5.2.1.1 Belanja Pegawai
 - 5.2.1.2 Belanja Barang Dan Jasa
 - 5.2.2 Belanja Modal
- 5.3. Penjelasan Pos Neraca
 - 5.3.1 Aset
 - 5.3.2 Aset Lancar
 - 5.3.3 Aset Tetap

BAB VI : PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII: PENUTUP



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCATATAN TARGET KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Sesuai dengan Perubahan Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Ranah Pesisir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.2.227.899.688, untuk Belanja Langsung Rp.341.703.495 dan Belanja Tidak Langsung Rp.1.886.196.193, Kebijakan Keuangan pada Kecamatan Ranah Pesisir tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 yang telah diubah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2020 mencakup Kebijakan Bidang Belanja baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Belanja Daerah pada Kecamatan Ranah Pesisir untuk Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung dipergunakan untuk pembayaran Belanja Pegawai (Gaji dan Penghasilan Lain) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kecamatan Ranah Pesisir.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung mencakup kebijakan bidang belanja yang berpihak kepada kepentingan publik, dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi
- b. Penyedia Jasa administrasi keuangan
- c. Penyedia Jasa Kebersihan
- d. Penyedia Alat tulis Kantor
- e. Penyedia Barang Cetak Pengadaan
- f. Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- g. Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- h. Penyedia Makan dan Minum
- i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah
- j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

II. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- b. Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor



- III. **Program Pengembangan Lingkungan Sehat**
 - a. Fasilitasi dan Pembinaan Lingkungan Sehat
- IV. **Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/Nagari**
 - a. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat
 - b. Memasyarakatkan Olahraga di desa/nagari
- V. **Program perencanaan pembangunan daerah**
 - a. Penyelegaraan Musrenbang RKPD
- VI. **Program program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa/Nagari**
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Keuangan Pemerintahan Nagari
- VII. **Program pementapan Otonomi Daerah**
 - a. Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan
- VIII. **Program Penigkatan IMTAQ**
 - a. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ
 - b. Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan
- IX. **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**
 - a. Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional

Pelaksanaan program pembangunan Urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Tahun 2016 – 2020 yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja sasaran Urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, sebagai berikut:

PENGUKURAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020

- Visi : Terwujudnya sumber daya aparatur Kecamatan yang profesional dalam pelayanan menuju masyarakat yang religius, aman dan sejahtera
- Misi : Meningkatkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai, agama dan budaya.

Tabel I

Sasaran Strategis		Satuan	Target
Uraian	Indikator Kinerja		
1	2	3	4
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	b. Fasilitasi penyelenggara n PATEN	12 bln	100%
Meningkatkan peran serta pemerintah kecamatan dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan	1. Meningkatkan peran serta pemerintah kecamatan dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan	12 bln	100%



Dari Target Kinerja Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2020 sebagaimana tersebut di atas, didukung dengan Program dan Kegiatan Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2020 yang target dan realisasinya sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln	12 bln	95
		b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bln	12 bln	100
		c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bln	12 bln	100
		d. Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bln	12 bln	100
		e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bln	12 bln	100
		f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bln	12 bln	100
		g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bln	12 bln	100
		h. Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bln	12 bln	100
		i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12 bln	12 bln	100
		j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12 bln	12 bln	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	1 Paket	100
		b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bln	12 bln	100
		c. Pemeliharaan Rutin/berkala	12 bln	12 bln	100



		Kendaraan Dinas/Operasional			
		d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 bln	12 bln	100
3	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	a. Fasilitasi dan Pembinaan Lingkungan Sehat	0	0	0
4	Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/Nagari	a. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat	12 bln	12 bln	100
		b. Memasyarakatkan Olahraga di Desa/Nagari	1 kali	1 kali	100
5	Program perencanaan pembangunan daerah	a. Penyelegaraan Musrenbang RKPD	1 kali	1 kali	100
6	Program program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa/Nagari	a. Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan Nagari	10 nagari	10 nagari	100
7	Program pementapan Otonomi Daerah	a. Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan	0	0	0
8	Program Peningkatan IMTAQ	a. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ	0	0	0
		b. Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan	0	0	0
9	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	a. Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	0	0	0



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22,200,000	21,092,380	95
		b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	37,618,246	37,618,246	100
		c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16,573,209	16,573,209	100
		d. Penyediaan Alat Tulis Kantor	28,064,824	28,064,824	100
		e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11,543,666	11,543,666	100
		f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,227,864	5,227,864	100
		g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000	3.600.000	100
		h. Penyediaan Makanan dan Minuman	27.537.500	27.537.500	100
		i. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	325.000	325.000	100
		j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	13.125.000	13.125.000	100
Jumlah Progrm Administrasi Perkantoran			165.815.309	164.682.689	99.5
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	15.000.000	15.000.000	100
		b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	34.988.756	34.988.756	100
		c. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan	70.217.152	70.217.152	100



		Dinas/Operasional			
		d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1.740.000	1.740.000	100
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			121.945.908	121.945.908	100
3	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	a. Fasilitasi dan Pembinaan Lingkungan Sehat	0	0	0
Jumlah Program Pengembangan Lingkungan Sehat			0	0	0
4	Pemberdayaa n Lembaga Sosial Masyarakat/N agari	a. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat	34.511.278	34.511.278	100
		b. Memasyarakatkan Olahraga di Desa/Nagari	15.100.000	15.100.000	100
Jumlah Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/Nagari			49.611.278	49.611.278	100
5	Program perencanaan pembangunan daerah	a. Penyelegaraan Musrenbang RKPD	3.506.000	3.506.000	100
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah			3.506.000	3.506.000	100
6	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa/Nagari	a. Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan Nagari	825.000	825.000	100
Jumlah program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa/Nagari			825.000	825.000	100
7	Program pementapan Otonomi Daerah	a. Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan	0	0	0
Jumlah Program pementapan Otonomi Daerah			0	0	0



8	Program Peningkatan IMTAQ	a. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ	0	0	0
		b. Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan	0	0	0
Jumlah Program Peningkatan IMTAQ			0	0	0
9	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	a. Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	0	0	0
Jumlah Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			0	0	0

1.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dalam pencapaian Target Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dapat dilaksanakan 100 %, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 95%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pencapaian Target Kinerja **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 95 % hal ini tidak ada masalah dalam penyerapan anggaran.
2. Pencapaian Target Kinerja **Penyedia Jasa administrasi keuangan** dapat dilaksanakan 100 % dan untuk capaian Target Kinerja Keuangan 100 % hal ini disebabkan tidak ada masalah dalam penyerapan anggaran.
3. Pencapaian Target Kinerja **Penyedia Jasa Kebersihan** dapat dilaksanakan 100 %, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 100 % hal ini disebabkan tidak ada masalah dalam penyerapan anggaran.
4. Pencapaian Target Kinerja **Penyedia Alat tulis Kantor** dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 100% hal ini disebabkan tidak ada masalah dalam penyerapan anggaran dan Alat tulis kantor cukup untuk kebutuhan 2020.
5. Pencapaian Target Kinerja **Penyedia Barang Cetak Pengadaan** dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 100%, hal ini disebabkan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.
6. Pencapaian Target Kinerja **Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** dapat dilaksanakan 100 %, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 100 % pelaksanaan kegiatan

tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.

7. Pencapaian Target Kinerja **Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 100 % pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.
8. Pencapaian Target Kinerja **Penyedia Makan Minum** dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 99.98% pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.
9. Pencapaian Target Kinerja **Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerahnyedia** dapat dilaksanakan 100 %, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 100 % pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.
10. Pencapaian Target Kinerja **Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah** dapat dilaksanakan 100 %, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 100 % pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.

b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Dalam pencapaian Target Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dapat dilaksanakan 100 %, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 100%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pencapaian Target Kinerja **Pengadaan Peralatan Gedung Kantor** dapat dilaksanakan 100 %, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 100% pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020
2. Pencapaian Target Kinerja **Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor** dapat dilaksanakan 100 %, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 85.25 % pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020
3. Pencapaian Target Kinerja **Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional** dapat dilaksanakan 100 %, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 100 % pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.



4. Pencapaian Target Kinerja **Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor** dapat dilaksanakan 100 %, yang digunakan perbaikan printer sebanyak 6 Unit, Laptop sebanyak 3 Unit dan Komputer sebanyak 1 unit Pencapaian Target Kinerja Keuangan 100 % pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.
- c. **Program Pengembangan Lingkungan Sehat**
 1. Pencapaian Target Kinerja **Fasilitasi dan Pembinaan Lingkungan Sehat** dapat dilaksanakan 0 %, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 0 % pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.
- d. **Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/Nagari**
 1. Pencapaian Target Kinerja **Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat** dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 100% pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.
 2. Pencapaian Target Kinerja **Memasyarakatkan Olahraga di Desa/Nagari** dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 100% pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.
- e. **Program perencanaan pembangunan daerah**
 1. Pencapaian Target Kinerja **Penyelegaraan Musrenbang RKPD** dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 100% pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.
- f. **Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa/Nagari**
 1. Pencapaian Target Kinerja **Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan Nagari** dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 100% pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.
- g. **Program pementapan Otonomi Daerah**
 1. Pencapaian Target Kinerja **Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan** dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja



Keuangan 100% pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.

h. **Program Peningkatan IMTAQ**

1. Pencapaian Target Kinerja **Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ** dapat dilaksanakan 0%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 0% pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.
2. Pencapaian Target Kinerja **Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan** dapat dilaksanakan 0%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 0% pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.

i. **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**

1. Pencapaian Target Kinerja **Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional** dapat dilaksanakan 0%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 0% pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi

Entitas Pelaporan Keuangan Daerah dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 ini adalah Kecamatan Ranah Pesisir

4.2. Basis Akuntansi

Kecamatan Ranah Pesisir menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 menggunakan basis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Sebagai tindak lanjut Pemerintah Kecamatan Ranah Pesisir menyusun Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kecamatan Ranah Pesisir sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kecamatan Ranah Pesisir sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 yang digunakan sebagai dasar di dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Ranah Pesisir Tahun Anggaran 2020

4.3. Basis Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Kecamatan Ranah Pesisir Tahun Anggaran 2020. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan Kecamatan Ranah Pesisir Tahun Anggaran 2020 menggunakan nilai historis. Aset dicatat sebesar biaya perolehan dan biaya yang mengikuti sampai dengan aset tersebut dimanfaatkan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau nilai sekarang dari jumlah yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan Kecamatan Ranah Pesisir Tahun Anggaran 2020 menggunakan uang Rupiah. Laporan Keuangan Kecamatan Ranah Pesisir Tahun Anggaran 2020 menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar

Akuntansi Pemerintah pada Kecamatan Ranah Pesisir Pada Laporan Keuangan Kecamatan Ranah Pesisir Tahun Anggaran 2020 penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada adalah sebagai berikut:

- Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pada Kecamatan Ranah Pesisir dimana dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disebut belanja sedangkan dalam Laporan Operasional (LO) disebut beban;
- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Kecamatan Ranah Pesisir sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Inspektorat Daerah Kecamatan Ranah Pesisir, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya, terdiri dari:
 - ❖ Aset Lancar
 - ❖ Dana Cadangan
 - ❖ Investasi Jangka Panjang
 - ❖ Aset Tetap
 - ❖ Aset Lainnya
- Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Inspektorat Daerah Kecamatan Ranah Pesisir, terdiri dari:
 - ❖ Kewajiban Jangka pendek
 - ❖ Kewajiban jangka panjang
- Ekuitas adalah kekayaan bersih Kecamatan Ranah Pesisir yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Kecamatan Ranah Pesisir pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2020 dan 2020 Kecamatan Ranah Pesisir tidak ada atau tidak mempunyai pendapatan.

5.2. Belanja

Rincian Belanja menurut Jenis Belanja adalah sebagai berikut : (LRA)

No	Uraian	Tahun 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasional	2.227.899.688	2.153.255.203	97,92
2	Belanja Modal	15.000.000	15.000.000	100
	Jumlah	2.242.899.688	2.168.255.203	96,67

5.2.1. Belanja Operasional

Belanja Operasi merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Kecamatan Ranah Pesisir yang memberi manfaat jangka pendek. Pos Belanja Operasi terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.886.196.193	1.813.298.328	96,63
2	Belanja Barang dan Jasa	326.703.495	324.956.875	99,47
	Jumlah	2.212.899.688	2.138.255.203	96,62

5.2.2 Belanja Pegawai

No	Uraian	Tahun 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja gaji dan Tunjangan	1.354.614.234	1.315.998.039	97,15
2	Tambahan	531.581.959	497.300.289	93,55



	penghasilan berdasarkan beban kerja			
	Jumlah	1.886.196.193	1.813.298.328	96,13

Realisasi untuk Tahun Anggaran 2020 total untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.813.298.328 dari anggaran sebesar Rp. 1.886.196.193 atau sebesar 96,13%, yang terdiri dari :

- Belanja Gaji Pokok PNS

Dipergunakan untuk pembayaran Gaji dan Penghasilan lain bagi Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Ranah Pesisir Tahun anggaran 2020, direalisasikan sebesar Rp. 1.315.998.039 dari anggaran sebesar Rp. 1.354.614.234 atau sebesar 97,15%.

- Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja

Dipergunakan untuk pembayaran Tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Ranah Pesisir Tahun anggaran 2020, direalisasikan sebesar Rp. 497.300.289 dari anggaran sebesar Rp. 531.581.959 atau sebesar 96,55%.

5.2.3 Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Tahun 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	40.511.421	40.511.421	100
2	Belanja Jasa Kantor	31.750.000	30.642.380	96,51
3	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	49.217.152	48.603.152	98,75
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.523.666	13.523.666	100
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.100.000	6.100.000	100
6	Belanja Makanan dan Minuman	43.697.500	43.677.500	99,75
7	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.525.000	18.525.000	100,00
8	Belanja Perjalanan Dinas	13.450.000	13.445.000	99,96
9	Belanja Pemeliharaan	10.728.756	10.728.756	100
10	Honorarium PNS	30.200.000	30.200.000	100,00
11	Honorarium Non PNS	66.000.000	66.000.000	100,00
12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.000.000	15.000.000	100
	Jumlah	338.703.495	336.956.875	99,48



Tahun 2020 terdiri dari 9 (Sembilan) Program dan 23 (dua puluh tiga) Kegiatan. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 sebesar Rp. 336.956.875 dari anggaran sebesar Rp. 338.703.495 atau sebesar 99,48%.

5.2.4 Belanja Modal

No	Uraian	Tahun 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.000.000	15.000.000	100
	Jumlah	15.000.000	15.000.000	100

Belanja Modal Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2020 sebesar Rp. 15.000.000 dari anggaran sebesar Rp. 15.000.000 atau 100%.

Belanja Modal Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2020 berupa Belanja rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

5.3. Penjelasan Pos Neraca

5.3.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Kecamatan Ranah Pesisir sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Kecamatan Ranah Pesisir, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya

No	Uraian	Per 30 Desember 2020 (Rp)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Per 30 Desember 2019 (Rp)
1	Tanah	211.039.850	-	-	211.039.850
2	Peralatan dan Mesin	547.652.129	15.000.000	-	532.652.129
3	Gedung dan bangunan	919.034.000	-	-	919.034.000
4	Jalan, irigasi, dan jaringan	161.600.000	-	-	161.600.000



5	Aset tetap lainnya	629.167	-	-	629.167
6	Konstruksi dalam pengerjaan	Rp. 0	-	-	Rp. 0
7	Akumulasi dalam penyusutan	-	-	-	(564.575.518,69)
Jumlah		1.839.955.146	15.000.000	-	1.260.379.627,31

5.3.2. Aset Lancar

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas atau setara kas. Aset Lancar Kecamatan Ranah Pesisir terdiri dari:

No	Uraian	Per 30 Desember 2020	Per 30 Desember 2019
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
2	Kas di Bendahara Penerimaan		
3	Piutang Pajak	-	-
4	Barang Persediaan	Rp.31.000	
5	Piutang Retribusi	-	-
6	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-
7	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Daerah	-	-
8	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	-
9	Piutang kepada Pihak Ketiga	-	-
10	Piutang Lainnya	-	-

Dari tabel di atas pada Kecamatan Ranah Pesisir tidak saldo dari aset lancar baik itu pada akhir tahun 2019 maupun pada akhir tahun 2020 karena penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.



5.3.3. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa mamfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Kecamatan Ranah Pesisir untuk dimanfaatkan oleh kepentingan Umum, saldo aset tetap pe 30 desember 2020 sebesar Rp. 1.839.955.146,- terdiri dari :

✚ Tanah	: Rp. 211.039.850
✚ Peralatan dan mesin	: Rp. 547.652.129
✚ Gedung dan bangunan	: Rp. 919.034.000
✚ Jalan, irigasi dan jaringan	: Rp. 161.600.000
✚ Aset tetap lainnya	: Rp. 629.166
✚ Kontruksi dalam pengerjaan	: Rp.
✚ Akumulasi penyusutan	: Rp.
Rp. 1.839.955.146	

Perbandingan antara Aset Tetap Kecamatan Ranah Pesisirpada akhir Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Per 30 Desember 2020 (Rp)	Per 30 Desember 2019 (Rp)
1	Tanah	211.039.850	211.039.850
2	Peralatan dan Mesin	547.652.129	532.652.129
3	Gedung dan bangunan	919.034.000	919.034.000
4	Jalan, irigasi, dan jaringan	161.600.000	161.600.000
5	Aset tetap lainnya	629.167	629.167
6	Konstruksi dalam pengerjaan	Rp. 0	Rp. 0
7	Akumulasi dalam penyusutan		(564.575.518,69)
Jumlah		1.839.955.146	1.260.379.627,31

Secara rinci Aset Tetap dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Tanah

Pada Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Ranah Pesisir tidak ada Belanja Tanah.

2. Peralatan dan Mesin

No	Uraian	2020 (Rp.)
1	Alat Angkutan Darat Bermotor a. Kendaraan Bermotor Penumpang b. Kendaraan Bermotor Beroda Dua c. Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	Rp. 232.061.628 Rp. 176.722.412 Rp. 18.745.261 Rp. 36.593.955
2	Alat Kantor a. Mesin Tik b. Alat Kantor Lainnya	Rp. 60.915.549 Rp. 5.000.000 Rp. 55.915.549
3	Alat Rumah Tangga a. Meubelair b. Alat Pendingin c. Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp. 114.872.001 Rp. 66.322.000 Rp. 12.000.000 Rp. 36.550.001
4	Komputer a. Personal Komputer b. Peralatan Komputer Mainframe c. Peralatan Mini Komputer d. Peralatan Personal Komputer	Rp. 75.301.951 Rp. 55.804.451 Rp. 500.000 Rp. 9.790.000 Rp. 9.207.500
5	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat a. Kursi Kerja Pejabat b. Lemari dan Arsip Pejabat	Rp. 24.045.000 Rp. 10.500.000 Rp. 13.545.000
6	Alat Studio a. Peralatan Studio Visual	Rp. 20.500.000 Rp. 20.500.000
Jumlah Peralatan dan Mesin		Rp. 527.696.129

3. Jalan, irigasi, dan jaringan

Pada Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Ranah Pesisir tidak ada Belanja Jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp. 161.600.000

4. Gedung dan Bangunan

Pada Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Ranah Pesisir Aset Tetap untuk Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 919.034.000

5. Aset Tetap Lainnya

Pada Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Ranah Pesisir Aset Tetap untuk Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 629.167

6. Konstruksi dalam pengerjaan

Pada Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Ranah Pesisir tidak ada Konstruksi dalam Pengerjaan, sehingga Aset Tetap untuk Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp.- (Nol Rupiah).



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

OPD Kecamatan Ranah pesisir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010. Susunan organisasi terdiri dari Camat yang saat ini di jabat oleh Zul Arzil, S.Sos, Sekretaris Kecamatan, beberapa Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Sub Bagian serta Staf. Sebagai tindak lanjut dari Perda tersebut diatas, dalam rangka menentukan Tupoksinya telah diatur dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017.

Dilihat dari jumlah pegawai, saat ini pegawai yang berstatus PNS berjumlah 19 orang terdiri dari :

- Golongan IV.b : 1 Orang
- Golongan IV.a : 2 orang
- Golongan III.d: 4 orang
- Golongan III.c: 2 orang
- Golongan III.b: 3 orang
- Golongan III.a: 2 orang
- Golongan II.d : 1 orang
- Golongan II.c : 3 orang
- Golongan II.b : 1 orang

A. Struktur Organisasi

Susunan organisasi OPD Kecamatan Ranah Pesisir saat ini terdiri dari 1 (satu) Eselon III. A, 1 (satu) Eselon III.B, 5 (lima) Eselon IV.A dan 2 (Dua) Eselon IV.B Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut :

- a. Kepala Kecamatan (Camat)
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Keuangan Perencanaan dan Program
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman Ketertiban
- e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Seksi Pelayanan



BAB VII

PENUTUP

Kinerja OPD Kecamatan Ranah Pesisir secara Struktural dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) telah mencapai keberhasilan namun belum optimal, disamping itu tentu ada kekurangan yang disebabkan berbagai permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas.

Kantor Camat Ranah Pesisir telah berupaya semaksimal mungkin dengan berbagai dukungan dari semua pihak untuk mencapai sasaran program dengan memanfaatkan kekuatan yang ada guna menghadapi kendala untuk mencapai tujuan dan sasaran terutama pada pengelolaan keuangan.

Dengan telah melakukan penelitian pada pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban belanja dana Kecamatan Ranah Pesisir selama TA. 2020, maka dibuat Laporan Keuangan OPD Tahun Anggaran 2020.

Apabila dibandingkan dengan Laporan Keuangan tahun sebelumnya mengalami perubahan, maka terhadap Laporan Keuangan Tahun 2020 diberikan penjelasan yang disampaikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, tersebut di atas.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini dibuat sampai dengan Akhir Tahun 2020 dari Inspektorat Daerah Kecamatan Ranah Pesisir, disampaikan untuk menjadikan maklum adanya.



CAMAT RANAH PESIR

L ARZIL, S.Sos

Pembina TK I

NIP. 19650101 19860 2 004